



Analisis Pengaruh Zakat, Pembiayaan Syariah, Tingkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh) Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Aceh

Surya Alfi Nurrahma

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

suryaalfinurrahma@uinsu.ac.id

Tri Inda Fadhila Rahma

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

triindafadhila@uinsu.ac.id

Khairina Tambunan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

khairinatambunan@uinsu.ac.id

Alamat: Jl. Wiliam Iskandar Medan Tembung
Korespondensi penulis: suryaalfinurrahma@uinsu.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the influence of Zakat, Sharia Financing, Human Development Index (HDI) Level, and Aceh Revenue and Expenditure Budget (APBA) on Poverty Alleviation in Aceh. This research uses a descriptive quantitative approach and explanatory panel data for 10 years. This research uses secondary data obtained from world data banks, journals, books and other supporting references. The analytical tool used in this research is SPSS 22 with multiple regression analysis techniques. The research results show that the partial significant test of the Zakat variable is obtained from the results of the t test where the calculated t value is $0.338 < t \text{ table } 1.692$, so it can be concluded that zakat has no effect on poverty alleviation in Aceh. Meanwhile, the Sharia Financing variable is obtained from the results of the t test where the t value is $1.834 > t \text{ table } 1.692$, so it can be concluded that sharia financing has an effect on poverty alleviation in Aceh. Meanwhile, the variable level of the Human Development Index (HDI) can be seen from the results of the t test where the t value is $1.872 > t \text{ table } 1.692$, so this shows that the sharia development index has an effect on poverty alleviation in Aceh. Meanwhile, the Aceh Revenue and Expenditure Budget (APBA) variable can be seen from the results of the t test where the value of tcount is $1.236 < t \text{ table } 1.692$, it is concluded that the Aceh Revenue and Expenditure Budget (APBA) has no and significant influence on poverty alleviation in Aceh. Meanwhile, together (simultaneously) the variables zakat, sharia financing, human development index level and the Aceh income and expenditure budget have an effect on poverty alleviation. It can be seen that the calculated F value is 13.466 with a sig value of $0.000 < 0.05$, where the calculated F value is $13.466 > 2.66$.*

Keywords: Zakat, Sharia Financing, HDI Level, Apba, Poverty

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Zakat, Pembiayaan Syariah, Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) terhadap Pengentasan Kemiskinan di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan eksplanasi data panel selama 10 tahun. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari world bank data, jurnal, buku dan referensi pendukung lainnya. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 22 dengan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial uji signifikan variabel Zakat yang didapat dari hasil uji t dimana nilai t hitung $0,338 < t \text{ tabel } 1,692$ maka dapat disimpulkan bahwa zakat tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh. Sedangkan Pada variabel Pembiayaan Syariah didapat dari hasil uji t dimana nilai thitung $1,834 > t \text{ tabel } 1,692$ maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh. Sedangkan pada Variabel Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilihat dari hasil uji t dimana nilai thitung $1,872 > t \text{ tabel } 1,692$ maka dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa indeks pembangunan syariah berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh. Sedangkan Variabel Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dapat dilihat dari hasil uji t dimana nilai thitung $1,236 < t \text{ tabel } 1,692$ disimpulkan bahwa Anggaran pendapatan belanja Aceh (APBA) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh. Sedangkan secara bersama-sama (simultan) variabel zakat, pembiayaan syariah, tingkat indeks pembangunan manusia dan anggaran pendapatan belanja aceh berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Dilihat bahwa nilai F hitung 13,466 dengan nilai sig $0,000 < 0,05$, dimana nilai F hitung $13,466 > 2,66$.

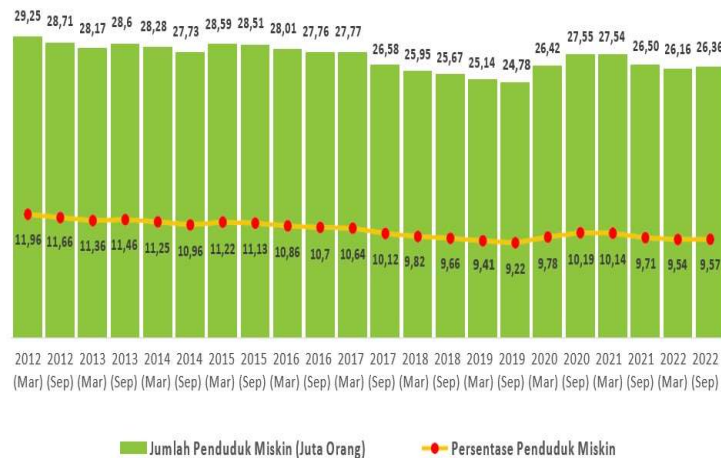
Kata Kunci: Zakat, Pembiayaan Syariah, Tingkat Ipm, Apba, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam setiap negara untuk mencapai target-target pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun belum ada definisi formal, tata kelola pemerintahan dianggap krusial dalam menjamin kesejahteraan nasional, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut UNDP, tata kelola pemerintahan yang baik mencakup kewenangan ekonomi, administrasi, dan politik untuk mengatur masalah-masalah sosial. Bank Dunia lebih menekankan aspek ekonomi dalam tata kelola pemerintahan, dengan mempertimbangkan sistem pengaturan pembangunan negara yang kuat dan bertanggung jawab, yang beriringan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien serta menghindari kesalahan alokasi dana pembangunan dan penanggulangan dini tindak pidana korupsi (Muliang Ningsih).

Kesejahteraan menjadi fokus utama pembangunan nasional, mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kemajuan dalam kesejahteraan masyarakat dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan angka harapan hidup. Setiap pemerintahan bertanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pangan, dan tempat tinggal. Penanggulangan kemiskinan mencerminkan keberhasilan kinerja sebuah pemerintahan, yang tercermin dalam persentase angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, dengan negara maju cenderung memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih sedikit dan jurang antara kaya dan miskin yang lebih rendah.

Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2012 sampai dengan September 2022 disajikan pada Gambar 1.1



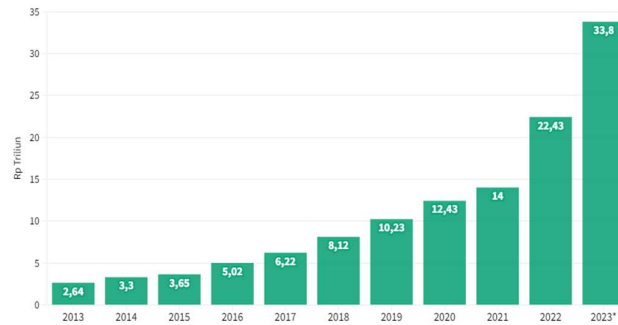
Gambar 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2012–September 2022

Sumber: Data BPS yang diolah

Disisi lain zakat merupakan salah satu instrumen yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan penelitian Yoghi Citra Pratama (2015) ditemukan bahwa meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya

pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif. Dan zakat menjadi instrument keuangan yang efektif dalam permasalahan modal kaum miskin (Pratama, 2015).

Berikut merupakan jumlah zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS dari tahun 2013-2023.



Gambar 1. 2 Pengumpulan Dana ZIS dan DSKL Nasional

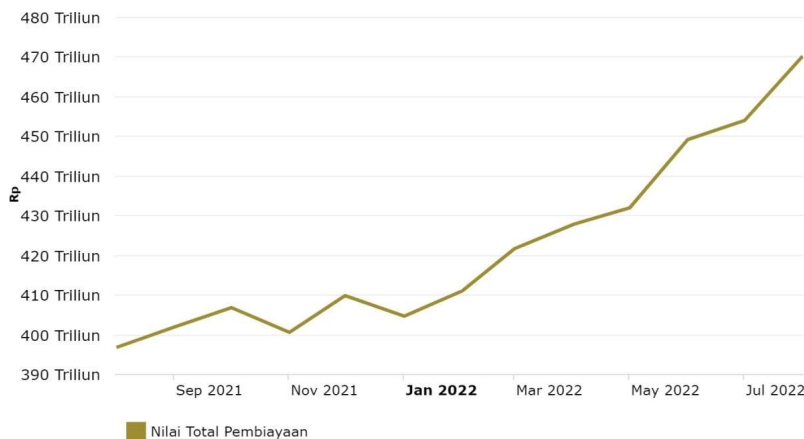
Sumber: Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat, pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) mencapai Rp22,43 triliun pada 2022. Nilai tersebut meningkat hingga 58,90% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut utamanya berasal dari pembayaran zakat mal sebesar 22,11% dan zakat hewan kurban hingga 400,95%. Kendati, realisasi tersebut baru mencapai 86,29% dari target yang ditetapkan pada 2022 sebesar Rp26 triliun. Adapun, jumlah pengumpulan dana ini meliputi zakat mal, zakat fitrah, infak/sedekah, DSKL, ZIS & fitrah di luar neraca, serta kurban & DSKL di luar neraca. Berikut rinciannya pengumpulan dana ZIS dan DSKL pada 2022. Adapun, Baznas menargetkan pengumpulan dana ZIS dan DSKL mencapai Rp33,8 triliun pada tahun ini. Proyeksi tersebut dilakukan melalui metode pendapat dengan asumsi pertumbuhan lebih dari 30%.

Sebagai umat Islam dengan jumlah paling banyak di dunia tentu saja hal ini bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan, apabila dilakukan manajemen yang baik. Salah satu sulitnya dalam pengumpulan zakat adalah kurangnya kesadaran dan keimanan masyarakat dalam pelaksanaan zakat. Sebagai sebuah filantropi dalam Islam, realisasi filantropi ini adalah wujud kepedulian umat terhadap sesama. Islam mengajarkan bahwa harta yang diberikan oleh Allah SWT adalah titipan-Nya, dan ada hak-hak orang lain pada harta yang dititipkan tersebut. Terdapat kewajiban kita untuk menyalurkan sebagian harta yang kita miliki sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Pembiayaan merupakan salah satu variabel penting dalam kaitannya untuk pengentasan kemiskinan. Dengan adanya pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya pihak-pihak yang kekurangan dana akan memperoleh suntikan dana untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Berikut merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh Bank Syariah di Indonesia dari tahun 2021 hingga tahun 2022.

Gambar 1.3 Nilai Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia (Agustus 2021-Agustus 2022)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai total pembiayaan seluruh jenis akad dari bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia mencapai Rp470 triliun padapada Agustus 2022, tumbuh 8,51% dalam setahun (year-on-year/yoy) selama periode Januari-Agustus 2022 trennya juga konsisten tmeningkat setiap bulan, seperti terlihat pada grafik diatas (Ahdiat, 2023).

Hal ini sejalan dengan penjelasan mengenai bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui kegiatan aktivitas usahanya dalam hal ini pembiayaan mudharabah yang berdasarkan prinsip syariah (Isretno, 2011). Meski demikian, dalam realitasnya pembiayaan atau penyaluran dana dengan akad mudharabah lebih sedikit presentasinya dari pada pembiayaan dana dengan akad lainnya. Seperti murabahah, musyarakah dan qardh. Hal ini diperoleh dari data perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Variabel berikutnya yang mempengaruhi kemiskinan adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/ indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Sistem perhitungan ini diperkenalkan oleh seorang ekonomi bernama Amartya Sen dan dibantu oleh Mahbub Ul Haq, sehingga sering indeks ini disebut Indeks Sen. IPM mencakup 3 (tiga)

komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan hidup layak (decent living).

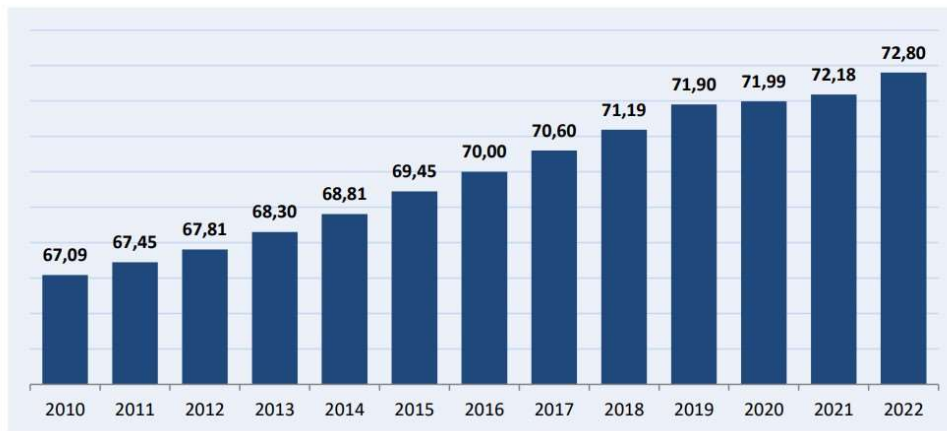
Dalam beberapa tahun belakangan ini APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) lebih banyak difokuskan untuk menurunkan angka kemiskinan di negara kita. Beberapa program pengentasan kemiskinan semakin mendapatkan porsi yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berbagai program perlindungan sosial dan bantuan untuk masyarakat miskin/daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh pemerintah menunjukkan hasil yang cukup baik yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya indikator kesejahteraan. Beberapa program yang dilakukan yaitu: (1) bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); (2) bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (bidikmisi) melalui KIP Kuliah (3) Program Keluarga Harapan (PKH) (4) bantuan sosial pangan melalui Kartu Sembako (5) bantuan Penerima Bantuan Iuran untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN); (6) subsidi (di luar subsidi pajak); (7) dana desa dan (8) program pembiayaan ultra mikro.

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini. Provinsi Aceh satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapatkan keistimewaan untuk menerapkan Syariat Islam dalam pemerintahannya. Provinsi ini juga menggunakan Qanun sebagai peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh berlandaskan syariat Islam. Aceh juga memiliki perbedaan dalam hal pengelolaan zakat, di Aceh, pengelolaan zakat dikelola Baitul Mal sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara di daerah lain dikelola oleh BAZNAS dan bukan PAD.

Untuk pembiayaan di Provinsi ini juga memiliki perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Pada tahun 2018 Pemerintah daerah Aceh mengeluarkan Qanun No. 11 Tahun 2018, inti dari qanun tersebut adalah seluruh lembaga keuangan yang tidak menerapkan syariat Islam dalam operasionalnya harus berhenti beroperasi dan keluar dari bumi serambi Mekkah ini. Realisasi Qanun ini dilaksanakan pada awal tahun 2021, hal ini menyebabkan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi di Provinsi Aceh hanya lembaga-lembaga keuangan syariah saja.

Untuk IPM walaupun masih berada pada rata-rata IPM nasional akan tetapi Pembangunan manusia di Provinsi Aceh terus mengalami kemajuan dan peningkatan pada periode 2010 hingga 2022. Selama 2010-2021 IPM Provinsi Aceh rata-rata meningkat sebesar 0,68 persen per tahun, dari 67,09 pada tahun 2010 menjadi 72,80 pada tahun 2022. Pada periode 2021-2022, IPM Provinsi Aceh tumbuh sebesar 0,86 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2020-2021 yang tumbuh sebesar 0,26 persen. Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia Provinsi Aceh meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19, peningkatan IPM Provinsi Aceh sudah kembali membaik pada tahun 2021 hingga tahun 2022

seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita (yang disesuaikan). Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh, 2010-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) juga menjadi penting untuk diteliti untuk melihat dan menganalisis persentase anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan bagaimana realisasinya di lapangan.

KAJIAN TEORI

Definisi Kemiskinan

Kotze dalam Hikmat (2004) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendati pun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasi ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin. Selanjutnya Supriatna (2000) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidak berdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal. Todaro & Smith (2006) mengatakan besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (poverty line). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Definisi Zakat

Menurut bahasa, zakat artinya keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula dengan orang yang tidak waras. Apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai nisab, walinya wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula halnya orang meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat, maka wajib atas ahli warisnya membayarkan zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan (Al-Hafidz, 2008). Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan menurut para mazhab berbeda lagi dalam mendefinisikan zakat.

a) Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

b) Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah (Nuruddin M. Ali, 2006).

c) Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus.

d) Menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-Qur'an.

Menurut hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin (Moh. Daud Ali, 2012).

Pembiayaan Bank Syariah

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, "saya percaya", atau "saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibulmal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan (Veithzal Riva'i, 2008). Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan, syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُكُمْ أَن تَبْلُغُوا إِلَىٰ مَجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرٌّ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Imam Nasafi dalam karyanya, Tafsir An-Nasafi menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari'at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela.

IPM (Indeks Pembangunan Nasional)

Sumber daya manusia adalah modal yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu negara atau daerah. Indeks pembangunan manusia. (IPM) menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia, aspek yang menjadi fokus perhatian adalah peningkatan standar pendidikan, derajat kesehatan, dan mutu ekonomi keluarga. Ketiga hal tersebut satu sama lain saling berkaitan. Dengan demikian dalam konteks pembangunan SDM, ketiga aspek tersebut harus diperhatikan secara utuh (Hardjanto, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dan eksplanasi. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan karena menjelaskan gambaran awal tentang besarnya variabel yang menjadi objek penelitian seperti kemiskinan, zakat, pembiayaan syariah, IPM dan APBA di Aceh. Penelitian ini dilakukan di beberapa website resmi, untuk pengambilan data variabel Zakat data diakses dari <https://baznas.go.id>, sementara untuk data pembiayaan syariah diakses dari <https://ojk.go.id>, kemudian untuk IPM, APBA dan Kemiskinan diakses melalui <https://bps.go.id>, dari tahun 2012-2022. Berikut ini merupakan tabel rencana jadwal penelitian penulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah tersedia di world bank data, jurnal, buku dan referensi pendukung lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari publikasi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BPS (Badan Pusat Statistik) dan sumber-sumber lain yang masih relevan. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah untuk dianalisis sehingga akan mengetahui hasil dari penelitian.

Analisis ini menggunakan Regresi Linear Berganda Adapun persamaan model regresi berganda tersebut adalah (Suharyadi & Purwanto, 2009):

$$Y = \alpha + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4 + e$$

Y = Kemiskinan

α = Konstanta

b = Koefisien

x_1 = Zakat

x_2 = Pembiayaan

x_3 = IPM

x_4 = APBA

e = Standar error

Hasil dan Pembahasan

1. Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap data objek meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai keseluruhan (sum), nilai rata-rata (mean) dan standard deviasi untuk variabel pada masing-masing penelitian. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Zakat	44	2,00	23,70	7,8652	5,66669
Pembiayaan_Syariah	44	1,26	3,02	2,0706	,51435
IPM	44	67,63	73,00	70,3979	1,66394
APBA	44	17447884931,00	23933932763,22,00	120734586047,2,1820	550883858085,92650
Pengentasan_Kemiskinan	44	806,82	909,04	843,9576	23,76948
Valid N (listwise)	44				

Sumber: Hasil pengolahan SPSS,2023.

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa variabel zakat, pembiayaan syariah, tingkat IPM dan APBA memiliki jumlah data (N) sebanyak 44 data yang diambil sumber data publikasi BAZNAS (Badan Amal Zakat Nasional), OJK(Otoritas Jasa Keuangan), dan BPS (Badan Pusat Stastistik) pada periode tahun 2012-2022. Dimana:

1. Y menunjukkan nilai minimum sebesar 806,82 jiwa dan nilai maximum sebesar 909,04 jiwa kemudian nilai rata-rata Y sebesar 843,957 jiwa serta nilai standart deviasi nilai sebesar 23,769 jiwa.
2. X_1 menunjukkan nilai minimum sebesar 2 persen dan nilai maximum sebesar 23,7 persen

kemudian nilai rata-rata X1 sebesar 7,865 persen serta nilai standart deviasi sebesar 5,666 persen.

3. X2 menunjukkan nilai minimum sebesar 1,26 persen dan nilai maximum sebesar 3,02 persen kemudian nilai rata-rata X2 sebesar 2,07 persen serta nilai standart deviasi sebesar 0,514 persen.
4. X3 menunjukkan nilai minimum sebesar 67,63 persen dan nilai maximum sebesar 73 persen kemudian nilai rata-rata X3 sebesar 70,39 persen serta nilai standart deviasi sebesar 1,66 persen.
5. X4 menunjukkan nilai minimum sebesar 17.447.884.931 rupiah dan nilai maximum sebesar 2.393.393.276.322 rupiah, kemudian nilai rata-rata X4 sebesar 1.207.345.860.472,182 rupiah serta nilai standart deviasi sebesar 550.883.858.085,926 rupiah.

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa nilai rata-rata (mean) tertinggi ialah variabel ABPA dengan nilai 1.207.345.860.472,182 rupiah dan nilai rata-rata terendah yaitu X2 Pembiayaan Syariah sebesar 2,07 persen. Dan untuk standart deviasi nilai tertinggi yaitu Anggaran Pendapatan sebesar 550.883.858.085,926 rupiah dan terendah yaitu variabel Pembiayaan_Syariah sebesar 0,51435.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalias dalam penelitian menggunakan analisis kolmogrov smirnov. Distribusi dapat dikatakan normal apabila signifikan $> 0,05$. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4. 2
Hasil Uji Normalitas

ne-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,93541435
Most Extreme Differences	Absolute	,066
	Positive	,057
	Negative	-,066
Test Statistic		,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

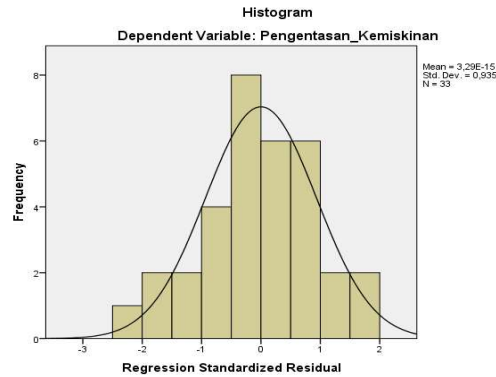
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS,2023

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat dari Asymp.Sig (2-tailed) menunjukkan bahwa hasil uji normalitasnya dikatakan normal dan memenuhi asumsi normalitas dengan nilai 0,200 tersebut lebih besar dari nilai signifikan pada uji normalitas yaitu 0,05. Selain menggunakan analisis kolmogrov smirnov test, data yang normal juga dapat dilihat dari hasil grafik histogram.



Gambar 4.1 Grafik Hiistogram

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS,2023

Berdasarkan pada gambar diatas, residual data telah menunjukkan bahwa kurva normal. Dari grafik histogram diatas dilihat bahwa kurva tidak condong ke kanan ataupun ke kiri, maka dapat dikatakan bahwa nilai normal.

3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat diantara variabel=variabel independen (bebas). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas maka hasil dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), jika nilai Tolarene >0,1 dan VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji dapat dilihat padah tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.3

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Zakat	,175	5,699
Pembiayaan Syariah	,515	1,941
IPM	,116	8,658
APBA	,492	2,031

a. Dependent Variable: Pengentasan_Kemiskinan

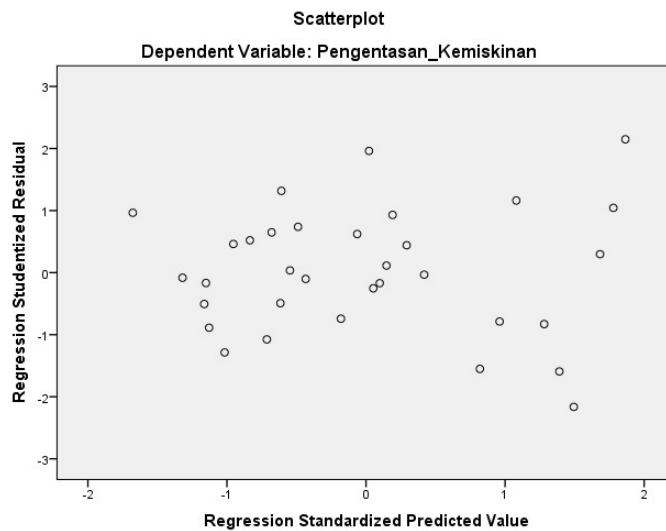
Sumber: Hasil pengolahan SPSS,2023

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel-variabel independen memiliki nilai Tolerance yang masing-masing >0.1 dan VIF <10 . Dengan demikian bahwa variabel-variabel independen yang digunakan tidak menunjukkan multikolinearitas.

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan varians dari nilai residual pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah bersifat heteroskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melihat grafik Scatterplot. Hasil dari uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.2 Scatterplot

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS,2023.

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa seluruh model regresi memiliki grafik scatter plot dengan titik titik yang terbentuk menyebar secara acak. Dengan demikian model regresi yang diajukan dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Sehingga dari kedua uji asumsi klasik tersebut dipastikan sudah memenuhi syarat untuk lanjut ke analisis regresi linear berganda.

c) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik Autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residul pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Hasil uji Autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4. 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,811 ^a	,658	,609	14,86113	1,342

a. Predictors: (Constant), APBA, Pembiayaan_Syariah, Zakat, IPM

b. Dependent Variable: Pengentasan_Kemiskinan

Sumber: Hasil pengolahan SPSS,2023

Pada tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,342 yang demikian bahwa hipotesis pada penelitian ini tidak ada autokorelasi positif atau negatif, maka diperoleh bahwa data penelitian tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 5
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	90,259	307,613		4,845	,000
Zakat	,374	1,107	,089	,338	,738
Pembiayaan_Syariah	13,052	7,115	,282	1,834	,047
IPM	8,695	4,646	,609	1,872	,042
APBA	8,398	,000	,195	1,236	,227

a. Dependent Variable: Pengentasan_Kemiskinan

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS,2023

Dari table diatas dapat dilihat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y=90,259 +0,374X_1+ 13,052X_2+8,695X_3+ 8,398X_4$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta sebesar 90,259 dengan arah hubungan positif.

1. Menunjukkan bahwa apabila variabel independen yaitu zakat, pembiayaan syariah, indeks pembangunan manusia, dan anggaran pendapatan belanja aceh memiliki nilai constant sebesar 90,2. Oleh karena itu jika ke empat variable tersebut meningkat 1% maka akan meningkatkan

pengentasan kemiskinan sebesar 90,2%.

2. Nilai koefisien regresi pada variabel zakat sebesar 0,374 dengan arah hubungan positif sehingga variabel dianggap konstanta. Oleh karena itu jika zakat meningkat 1% maka akan meningkatkan pengentasan kemiskinan sebesar 0,374%.
3. Nilai koefisien pada variabel pembiayaan syariah sebesar 13,052 dengan arah hubungan yang positif sehingga variabel dianggap konstanta. Oleh karena itu jika pembayaran syariah meningkat 1% maka akan meningkatkan pengentasan kemiskinan sebesar 13,05%.
4. Nilai koefisien pada variabel indeks pembangunan manusia sebesar 8,695 dengan arah hubungan negatif dimana hubungan antara indeks pembangunan manusia dengan pengentasan kemiskinan di aceh dianggap tidak konstanta dalam penelitian ini. Oleh karena itu jika IPM meningkat 1% maka akan meningkatkan pengentasan kemiskinan sebesar 8,695 %.
5. Nilai koefisien pada variable anggaran pendapatan belanja aceh sebesar 8,398 dengan arah hubungan positif dan dianggap tidak konstanta dalam penelitian ini. Oleh karena itu jika APBA meningkat 1% maka akan meningkatkan pengentasan kemiskinan sebesar 8,398 %.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Nilai R^2 menunjukkan tingkat kemampuan semua variabel bebas untuk mempengaruhi variabel terikat, sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel lain di luar variabel independen. Nilai R^2 mempunyai *range* antara 0-1, jika nilai *range* semakin mendekati angka 1 maka variabel independen semakin baik dalam mengestimasi dependennya. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada table 4.10 berikut ini:

Tabel 4. 6
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,811 ^a	,658	,609	14,86113	1,342

a. Predictors: (Constant), APBA, Pembiayaan_Syariah, Zakat, IPM

b. Dependent Variable: Pengentasan_Kemiskinan

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2023

Berdasarkan tabel diatas nilai koefisien determinasi atau Adjusted R Square yaitu sebesar 0,609 atau sama dengan 60,9%. Sedangkan sisanya 39,1% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti.

a) Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Tingkat signifikan 0.05 dengan hipotesis yang akan

diuji. Hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4. 7
Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11895,730	4	2973,932	13,466	,000 ^b
	Residual	6183,893	28	220,853		
	Total	18079,623	32			

a. Dependent Variable: Pengentasan_Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), APBA, Pembiayaan_Syariah, Zakat, IPM

umber: Hasil Pengolahan SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai F hitung 13,466 dengan nilai sig $0,000 < 0,05$, dimana $F \text{ hitung } 13,466 > 2,66$ ($df1 = 5-1=4$ dan $df2 = 44-5=28$). Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa zakat, pembiayaan syariah, IPM dan APBA secara bersama sama berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.

b) Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya dilakukan untuk menguji apakah variable bebas (X) secara individual mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Dasar pengambilan keputusan:

- Jika t hitung atau $\text{Sig} < 0,05$ maka ada pengaruh variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y)
- Jika t hitung $< t$ tabel atau $\text{Sig} > 0,05$ maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Hasil uji t dapat dilihat pada table 4.12 berikut ini:

Tabel 4. 8
Uji Parsial (uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	90,259	307,613		4,845	,000
Zakat	,374	1,107	,089	,338	,738
Pembiayaan_Syariah	13,052	7,115	,282	1,834	,047
IPM	8,695	4,646	,609	1,872	,042
APBA	8,398	,000	,195	1,236	,227

a. Dependent Variable: Pengentasan_Kemiskinan

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS,2023

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa variabel X1 (Zakat) memiliki nilai thitung $0,338 < t_{table} 1,692$. Sedangkan nilai sig $0,738 > 0,05$, maka dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Variabel X2 (Pembiayaan Syariah) dilihat pada tabel 4.13 menunjukkan nilai thitung $1,834 > t_{table} 1,692$. Dengan t hitung tersebut dilihat dari t tabel dengan jumlah $n = 44$ berdasarkan tingkat kesalahan 0.05 maka diperoleh $1,692$. Sedangkan nilai sig $0,04 < 0,05$, maka dapat dikatakan H_0 diterima H_a diterima. Dengan demikian bahwa pembiayaan syariah berpengaruh dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Variabel X3 (IPM) dilihat pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai thitung $1,872 > t_{table} 1,692$. Sedangkan nilai sig $0,04 < 0,05$, maka dapat dikatakan H_0 diterima H_a diterima. Dengan demikian bahwa IPM (Indeks pembangunan manusia) berpengaruh dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Variabel X4 (APBA) dilihat pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai thitung $1,236 < t_{table} 1,692$. Sedangkan nilai sig $2,27 > 0,05$, maka dapat dikatakan H_0 diterima dan H_a diterima. Dengan demikian bahwa APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

PEMBAHASAN

6. Pengaruh Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable zakat tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t dimana nilai thitung $0,338 < t_{table} 1,692$. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan nilai sig $0,738 > 0,05$, maka dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh. Variable zakat tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dikarenakan realisasi dana zakat di Indonesia tidak sepadan dengan potensi zakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Afyana et al. (2019) menyatakan bahwa persentase realisasi zakat di Indonesia tidak sampai 1% dari potensi zakat yang ada. Hal ini menjadi timpang bila mengingat jumlah populasi muslim di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.

Menurut Abdulloh Mubarak et al. (2022) menyatakan selain kualitas pelaporan keuangan, ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya realisasi penghimpunan zakat nasional. Pertama, masyarakat masih ada yang belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat. Kedua, masih banyak masyarakat yang belum mengerti hukum dalam mengeluarkan zakat itu sendiri, adalah hal bagaimana menghitungnya dan kepada siapa zakat itu

disalurkannya. Ketiga, lemahnya kerangka aturan yang mengiringi institusional zakat seperti tidak adanya sanksi apapun bagi orang lalai mengekuarkan zakat. Keempat, masih rendahnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana zakat.

Kesadaran pada implementasi zakat pada masyarakat, tidak diikuti dengan level pemahaman yang cukup, tidak seperti kewajiban ibadah lainnya. Rendahnya pemahaman terhadap kewajiban dari jenis-jenis zakat dan mekanisme pembayaran zakat. Agar dapat didistribusikan secara efektif dan efisien maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif.

Menurut Qardhawi (2005) dan Suratno (2017) menyebutkan bahwa ada dua jenis pendekatan dalam distribusi zakat. Pendekatan ini bersifat konsumtif, karena melihat kondisi mustahiq yang mendesak untuk mendapat pertolongan ataupun mendesak. Kedua pendekatan spiritual, pendekatan ini menitik beratkan alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan pada orang yang membutuhkan dengan cara memberikan dana secara terus menerus yang bertujuan mengatasi kemiskinan.

Hasil Penelitian berbanding terbalik dengan penelitian Fatimah yang berjudul pengaruh zakat terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia (2019) yang mengungkapkan bahwa zakat berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan.

7. Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan syariah berpengaruh dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t dimana nilai thitung $1,834 > t_{table} 1,692$. Sehingga H_0 diterima dan H_a diterima. Dengan nilai sig $0,04 < 0,05$, maka dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh.

Pembiayaan memiliki dampak yang cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian. Secara umum, kedudukan pembiayaan syariah dalam sistem ekonomi sebagai pertukaran keuangan yang khususnya pembiayaan dapat meningkatkan kegunaan modal, meningkatkan kegunaan suatu benda, meningkatkan pergerakan uang, meningkatkan semangat usaha masyarakat, pembiayaan sebagai sarana stabilitas ekonomi (Nawawi, 2008).

Pembiayaan syariah banyak disalurkan kepada UMKM yang secara tidak langsung UMKM adalah usaha yang sebagian besar penduduk yang kurang mampu dan secara tidak langsung juga mempengaruhi pada pengentasan kemiskinan. Hal ini disebabkan penyerapan tenaga kerja sebagian besar menyerap dari penduduk miskin.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian (Wibowo dan Widodo, 2005), yang menyatakan bahwa peningkatan pembiayaan akan berdampak pada sektor riil, baik itu kegiatan investasi oleh perusahaan maupun konsumsi dan produksi oleh rumah tangga. Seperti pada sektor

UMKM, pembiayaan muradhrabah yang mampu membantu pembiayaan sektor UMKM akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru, dan mengurangi pengangguran dan pada akhirnya masyarakat memiliki pendapatan dan daya beli, sehingga kemiskinan secara perlahan akan berkurang.

Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Dian Asta Selian yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Zakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara, yang mengungkapkan bahwa variabel pembiayaan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendudukan miskin di Sumatera Utara.

8. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengentasan Kemiskinan (IPM) Di Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t dimana nilai thitung $1,872 > t$ table $1,692$. Sehingga H_0 diterima dan H_a diterima. Dengan nilai sig $0,04 < 0,05$, maka dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan indeks pembangunan syariah berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh.

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah salah satu standar terpenting yang mendasari model pembangunan suatu negara atau daerah dalam konteks pembangunan ekonomi suatu daerah. Hal ini menunjukkan kalau IPM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan pembangunan daerah bersama indikator pembangunan manusia lainnya.

9. Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel anggaran pendapatan belanja Aceh tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t dimana nilai thitung $1,236 < t$ tabel $1,692$. Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan nilai sig $2,27 > 0,05$, maka dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa Anggaran pendapatan belanja Aceh (APBA) tidak memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh. Hal ini dikarenakan tidak konsistennya pemerintah daerah Aceh dalam megucurkan dana dalam memerangi kemiskinan atau bisa juga disebut fluktuatif, kadang dana tersebut tinggi dan kadang rendah sementara angka kemiskinan masih tinggi sehingga pengeluaran pemerintah menjadi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Lemahnya pendampingan terhadap kelompok-kelompok penerima bantuan juga menyebabkan program yang dilaksanakan tidak memperoleh hasil yang maksimal, sehingga belum bisa mengurangi angka kemiskinan itu sendiri.

10. Pengaruh Zakat, Pembiayaan Syariah, Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Aceh.

Hasil penelitian pada uji F menunjukkan bahwa zakat, pembiayaan syariah, tingkat indeks pembangunan manusia dan anggaran pendapatan belanja aceh secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di aceh. Dilihat bahwa nilai F hitung 13,466 dengan nilai sig $0,000 < 0,05$, dimana nilai F hitung $13,466 > 2,66$. Dengan demikian hal tersebut dapat menunjukkan bahwa zakat, pembiayaan syariah, indeks pembangunan manusia dan anggaran pendapatan belanja Aceh berpengaruh secara simultan terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh.

Nilai koefisien determinasi dari tabel 4.11 diketahui bahwa pengaruh zakat, pembiayaan syariah tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) dan anggran pendapatan belanja aceh (APBA) terhadap pengentasan kemiskinan yaitu sebesar 0,609 atau sama dengan 60,9%. Sedangkan sisanya 39,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musalim Ridlo & Ahmad Mifdhol Muthohar, 2020) berjudul Analisi Pengaruh Zakat, Pembiayaan Syariah dan APBN Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dan Malaysia, yang mengatakan bahwa secara simultan berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul **"Analisis Pengaruh Zakat, Pembiayaan Syariah, Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) terhadap Pengentasan Kemiskinan di Aceh"**. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel Zakat tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t dimana nilai thitung $0,338 < t_{tabel} 1,692$. Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan nilai sig $0,738 > 0,05$, maka dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh.
2. Variabel Pembiayaan Syariah berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t dimana nilai t hitung $1,834 > t_{tabel} 1,692$. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan nilai sig $0,04 < 0,05$, maka dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh.
3. Variabel Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t dimana nilai thitung $1,872 > t_{tabel} 1,692$. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan nilai sig $0,04 > 0,05$, maka dengan demikian hal

tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan indeks pembangunan syariah berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh.

4. Variabel Anggaran Pendapatan Belanja Aceh tidak berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t dimana nilai $t_{hitung} 1,236 < t_{tabel} 1,692$. Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan nilai $sig 2,27 > 0,05$, maka dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa Anggaran pendapatan belanja Aceh (APBA) Tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat, pembiayaan syariah, tingkat indeks pembangunan manusia dan anggaran pendapatan belanja aceh secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Dilihat bahwa nilai F hitung 13,466 dengan nilai $sig 0,000 < 0,05$, dimana nilai F hitung $13,466 > 2,66$. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa zakat, pembiayaan syariah, indeks pembangunan syariah dan anggaran pendapatan belanja aceh berpengaruh secara simultan terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Aceh untuk aktif dalam memberikan dan mengawasi penyaluran zakat agar berjalan dengan lancar dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh. Baik itu zakat produktif atau pun zakat konsumtif.
2. Seharusnya pemerintah lebih mengawasi anggaran pendapatan belanja aceh (APBA) dan lebih memonitorin APBA dalam pengentasan kemiskinan yang ada di aceh

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambah variabel independen selain variabel independen yang ada pada penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Mubarak, Mushawir, Baihaqi Fanani, Ibnu Muttaqin, & Raihan, R. (2022). Theory and Models Underlying Ethical Investment Research. *International Journal of Social Science*, 2(1), 1187–1192. <https://doi.org/10.53625/ijss.v2i1.2365>
- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222-229. Universitas Mulawarman.
- Ahdiat, A. (2023). Pembiayaan Syariah di Indonesia Meningkatkan Sepanjang 2022. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/10/pembiayaan-syariah-di-indonesia-meningkat-sepanjang-2022>
- Al-Hafidz, A. W. (2008). *Kamus Ilmu Al-quran*. Amzah.
- Amin, S. M., & Al-Fandi, H. (2011). *Etika Beribadah. Berdasarkan Alquran & Sunnah*. Amzah.
- Chamsyah, B. (2006). *Teologi penanggulangan kemiskinan*. RMbooks.
- Charolina, A., Ruswanti, D., Studi Informatika, P., Sains, F., dan Kesehatan, T., & Sahid Surakarta Jl Adi Sucipto, U. (2019). Klastering Kota Dan Kabupaten Di Indonesia

- Berdasarkan Umur Harapan Hidup Saat Lahir Dengan K-Medoids. *Gaung Informatika*, 12(1), 2086–4221.
- Fadillah, A., Pospos, F. W., Shafira, A., & Dayyan, M. (n.d.). *DI PROVINSI ACEH THE EFFECT OF THE ACEH REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET , UNEMPLOYMENT AND INFLATION ON POVERTY IN ACEH PROVINCE*. 5(1), 1–13.
- Fauji Arif Lubis, M., Nasution, D. H. Y. S. J., HSB, R. R. A., Yanti, N., Atika, & Manjasari. (2019). pengantar ilmu ekonomi islam
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardjanto, I. (2013). *Teori Pembangunan*. UB Press.
- Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora utama press.
- Imsar, Nurhayati, & Harahap, I. (2023). Analysis of Digital Education Interactions, Education Openness, Islamic Human Development Index (I-HDI) and Indonesia' s GDE Growth. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(01), 753–772. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.4265>
- Isretno, E. (2011). *Pembiayaan mudharabah dalam sistem perbankan syariah*. Cintya Press.
- Karim, A. A. (2017). *Bank islam : Analisis fiqih dan keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Khomsan, A., Dharmawan, A. H., Saharuddin, Alfiasari, Sukandar, D., & Syarif, H. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kristin. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 233–234. <https://www.academia.edu/download/76624968/pdf.pdf>
- M.Ridwan, Syahbudi, M., Harianto, B., & Barus, E. E. (2022). *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Rajawali Pers.
- Masyhuri, & Zainuddin, M. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Alfabeta.
- Mulianingsih, S. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Tata Pemerintahan Di Kota Cimahi. *Jurnal Media Birokrasi*, 39–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v3i1.2470>
- Munkner, H. H., & Walter, T. (2001). *Sektor Informal Sumber Pendapatan Bagi Kaum Miskin, dalam Menggempur Akar-Akar Kemiskinan*. Yakoma-PGI.
- Nawawi, H. (2008). *Perencanaan Sumber Daya Manusia*. Gadjah Mada University Press.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1(1), 93–104.
- Rahma, T. I. F., & Radianti, A. (2023). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Zakat Perusahaan Asuransi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 534-547.
- Ramdhani, N., Anggraeni, Y., & Desmawan, D. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(2), 136–144.
- Ratnah S. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Defisit APBN Indonesia. *Journal Economix*, 3(2), 1–11.
- Ridlo, M., & Muthohar, A. M. (2020). Pengaruh Zakat, Pembiayaan Syariah Dan APBN Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(2), 123–130. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i2.1101>
- Santoso, S. (2000). *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT Elex Media Komputindo.
- Safira, R., Hasibuan, M., & Tambunan, K. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2021. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS*

- TRIANGLE,2(4),574587.Retrievedfrom<https://www.trianglesains.makarioz.org/index.php/JTS/article/view/170>Pengaruh Pertumbuhan
- Saragih,R.F.,Silalahi,P.R.,&Tambunan,K.(2022).Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007 – 2021. PESHUM : Jurnal Pendidikan,Sosial DanHumaniora,1(2),7179.Retrievedfrom<https://journal-nusantara.com/index.php/PESHUM/article/view/36>
- Selian, D. A. (2016). Pengaruh Pembiayaan Bank Syari'ah, Zakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara. *Jurnal As-Salam*, 1(Vol. 1 No. 2 (2016): Jurnal As-Salam), 90–104. <https://jurnal-assalam.org/index.php/JAS/article/view/62/55>
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyadi, & Purwanto. (2009). *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern*. Salemba Empat.
- Sulaeman. (2018). Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), 98–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>
- Sulhan. (2009). *Panduan Praktis SPSS untuk manajemen (Keuangan, SDM, Pemasaran)*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang.
- Supriatna, T. (2000). *Pokok-pokok kebijaksanaan Pembangunan*. Rineka Cipta.
- Syahbudi, M. (2018). Ekonomi Makro Perspektif Islam
- Tambunan Khairina. (2020). Ekonomi Pembangunan, 1, 18-24.Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.
- Widodo, S., & Dahiri. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Negara Terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Budget* , 39–53.
- Yuliani, M., Meliza, D., & Fitrianto, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 1–13. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2665](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2665)